

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti dinamika partisipasi politik kader PKK dalam perencanaan pembangunan desa melalui Konsultasi Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Studi ini secara khusus meneliti tiga bidang: upaya dan langkah yang diambil oleh kader PKK untuk memengaruhi kebijakan perencanaan pembangunan desa, peran kader PKK dalam memantau proses penganggaran beserta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, dan dampak peran kader PKK terhadap perencanaan dan pembangunan desa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus instrumental dan perspektif interpretatif – konstruktivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kemudian dianalisis menggunakan teknik model analisis data interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Hasil ini menunjukkan bahwa kader PKK menggunakan empat upaya utama untuk meningkatkan peluang proposal mereka diterima. Upaya-upaya ini meliputi menunjukkan kinerja mereka sebagai cara untuk mendapatkan kredibilitas, membangun hubungan pribadi dengan kepala desa dan dewan desa, mengelola dana yang dikumpulkan sendiri, dan mengajukan proposal mereka secara bertahap. Meskipun proses partisipasi bersifat formal dan terbuka, keterlibatan aktual anggota PKK masih bersifat konsultatif dan bukan menentukan. Hal ini masih berada pada tingkat simbolis, yang melibatkan pemberian informasi dan konsultasi, menurut teori Tangga Partisipasi Arnstein. Peran pengawasan anggaran oleh kader PKK masih tidak langsung dan terbatas karena kurangnya kapasitas di antara kader dan struktur anggaran desa yang kaku, yang sebagian besar berfokus pada proyek pembangunan fisik. Akibatnya, peran kader PKK telah berhasil memenuhi kebutuhan kesehatan dasar keluarga, tetapi belum memberikan dampak signifikan pada pemberdayaan perempuan yang lebih luas dalam hal ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, partisipasi politik kader PKK Nagori Bandar Jawa berada dalam tahap transisi, telah melampaui keterlibatan pasif tetapi belum mencapai partisipasi substantif dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang nyata dalam keputusan anggaran desa.

Kata Kunci: partisipasi politik, kader PKK, Musrenbangdes, perencanaan pembangunan desa, anggaran responsif gender

ABSTRACT

This thesis aims to examine the dynamics of political participation by PKK cadres in village development planning through the Village Development Planning Consultation (Musrenbangdes) in Bandar Jawa Village, Bandar Subdistrict, Simalungun Regency, North Sumatra. This study specifically examines three areas: the efforts and steps taken by PKK cadres to influence village development planning policies, the role of PKK cadres in monitoring the budgeting process along with the internal and external factors that influence it, and the impact of the PKK cadres' role on village planning and development. This study employs a descriptive qualitative approach with an instrumental case study design and an interpretive–constructivist perspective. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and were subsequently analyzed using the interactive data analysis model by Miles, Huberman, and Saldana (2014), which includes data condensation, data presentation, and the drawing and verification of conclusions. These results indicate that PKK cadres employ four main strategies to increase the likelihood of their proposals being accepted. These strategies include demonstrating their performance as a means of gaining credibility, building personal relationships with the village head and village council, managing funds they have raised themselves, and submitting their proposals in stages. Although the participatory process is formal and open, the actual involvement of PKK members remains consultative rather than decisive. This remains at a symbolic level, involving the provision of information and consultation, according to Arnstein's Ladder of Participation theory. The role of PKK cadres in budget oversight remains indirect and limited due to a lack of capacity among the cadres and a rigid village budget structure, which focuses primarily on physical development projects. As a result, the role of PKK cadres has successfully met families' basic health needs but has not yet had a significant impact on the broader economic and social empowerment of women. Overall, the political participation of PKK cadres in Nagori Bandar Jawa is in a transitional phase; it has moved beyond passive involvement but has not yet reached substantive participation with real decision-making power in village budget decisions.

Keywords: *political participation, PKK cadres, Musrenbangdes, village development planning, gender-responsive budgeting*